

**URGENSI PEMBATASAN PARTAI POLITIK
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

ALLICIA PUTRI PRASETYAJI
NBI : 1311900189

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**URGENSI PEMBATAAN PARTAI POLITIK DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI
INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

ALLICIA PUTRI PRASETYAJI

NBI : 1311900189

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**URGENSI PEMBATAAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM
Pemerintahan Presidensiil di Indonesia**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

ALLICIA PUTRI PRASETYAJI

NBI : 1311900189

Dosen Pembimbing

DR. AHMAD SHOLIKHIN RUSLIE S.H., M.H.

NPP: 20310210845

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**URGENSI PEMBATAAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM
Pemerintahan Presidensiil di Indonesia**

SKRIPSI

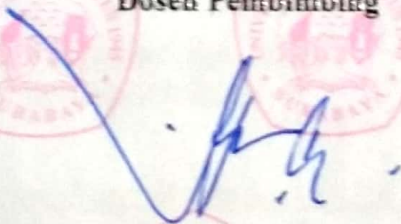
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

ALLICIA PUTRI PRASETYAJI

NBI : 1311900189

Dosen Pembimbing



DR. AHMAD SHOLIKHIN RUSLIE S.H., M.H.

NPP: 20310210845

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**URGENSI PEMBATAAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM
Pemerintahan Presidensiil di Indonesia**

Oleh:

ALLICIA PUTRI PRASETYAJI

NIM: 1311900189

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 5 Januari 2023

Bedasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1426/ST/FH/XII/2022

Pada Tanggal : 20 Desember 2022

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.

NPP/NIP: 20310890176

Sekretaris : Dipo Wahjoeono, S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310880149

Anggota : Abrahan Ferry Rosando, S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310160711

Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Allicia Putri Prasetyaji
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di JURNAL BUREAUCRACY: *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*: **URGENSI PEMBATASAN PARTAI POLITIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA.**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 4 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



10000
METERAN
TEMPEL
CCAKX268498893

Allicia Putri Prasetyaji

**HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alicia Putri Prasetyaji
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di JURNAL BUREAUCRACY: *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*: **URGENSI PEMBATASAN PARTAI POLITIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA.**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini penulis buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 4 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Alicia Putri Prasetyaji

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alicia Putri Prasetyaji
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang penulis buat dengan judul :

“URGENSI PEMBATAAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA”

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur PLAGIASI, penulis bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah penulis peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 4 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Alicia Putri Prasetyaji

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILIMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, penulis mahasiswa :

Nama : Allicia Putri Prasetyaji
Nomor Mahasiswa : 1311900189

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah penulis yang berjudul :

“URGENSI PEMBATASAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA”

Dengan demikian penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari penulis maupun memberikan royalti kepada penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis. Demikian pernyataan ini yang penulis buat dengan sebenarnya

Surabaya, 4 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Allicia Putri Prasetyaji

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dipersembahkan kepada diri penulis sendiri yang telah
berjuang untuk menyelesaikan Skripsi ini.
Serta untuk almamaterku Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.*

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur, atas selesainya penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada

1. Prof. Dr. Mulyanto, MM., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, kesempatan dan fasilitas serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya program sarjana Hukum.
3. Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum serta dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Hukum yang telah memberikan arahan dalam penyusunan proposal dengan baik dan benar untuk mempelancar mengerjakan skripsi.
4. Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH selaku Kaprodi sarjana (S1) program studi Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Dosen Wali yang telah membantu mengarahkan menyusun KRS (Kartu Rencana Studi) selama perkuliahan, serta yang telah membantu penulis melawati proses kelancaran perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie S.H.,M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan tambahan ilmu serta wawasan. Penulis ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk membimbing, mengoreksi, dan memberikan saran dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan wawasan di bidang hukum saat dari awal semester hingga akhir semester ini.
7. Seluruh civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terutama Fakultas Hukum yang telah menyediakan sarana pembelajaran

dengan baik sehingga penulis bisa mendapatkan ilmu dan membantu administrasi selama perkuliahan.

8. Ayah penulis tercinta dengan penuh kasih dan segala ketabahan serta penuh perjuangan dalam membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga dewasa menjadi pribadi yang baik, tangguh dalam menghadapi kehidupan dan ingin anaknya menjadi orang sukses kedepannya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Terimakasih atas doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan yaitu Mriya Afifah Furqania, Revita Pirena Putri, R. Aj Dwi Sukmaningru H., dan Novita Ariyanti yang memberikan penulis dukungan secara fisik maupun psikis dalam kelancaran pembuatan skripsi.

ABSTRAK

Konstitusional menyatakan bahwa sistem pemerintahan oleh bangsa Indonesia merupakan sistem pemerintahan Presidensiil, meski dalam praktik penyelenggaraannya seringkali dijumpai praktik-praktik yang merujuk kepada sistem pemerintahan parlementer. Perbedaan sistem yang demikian mengakibatkan siapapun presidennya tidak memiliki kewenangan untuk menyusun susunan kabinet secara mandiri dikarenakan harus memfasilitasi kepentingan partai politik yang terkait untuk menghindari permasalahan dengan dewan perwakilan rakyat (DPR). Praktik yang seperti itu pastinya tidak sehat dalam penerapan sistem presidensiil karena akan menghambat stabilitas pemerintahan dalam melaksanakan fungsinya, sebagai lembaga Eksekutif.

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum. Metode penulisan berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, sumber dan jenis bahan hukum, metode pendekatan, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Urgensi pembatasan partai politik dalam sistem presidensiil adalah untuk stabilitas pemerintahan, karena secara teoritis dalam sistem pemerintahan presidensiil jumlah keefektifan jumlah partai politiknya yaitu satu sampai dua partai dikarenakan dalam sistem pemerintahan ini menganut sistem kepartaian yang sederhana, sedangkan dalam praktik pemerintahan presidensial di Indonesia menerapkan sistem multi-partai dimana hal ini bertentangan dengan dasar negara dan mempengaruhi stabilitas dari sistem presidensiil itu sendiri.

Solusi yang diusulkan merupakan jalan tengah antara kombinasi sistem Presidensiil dan sistem multi-partai sederhana. Sistem multi partai yang sederhana harus didukung oleh aliansi partai yang erat, disiplin dan mengikat. Untuk menyederhanakan partai politik Indonesia, ada dua mekanisme yang bisa dilakukan secara bersamaan, yakni menaikkan ambang batas, dan memperkecil ukuran daerah pemilihan.

Kata Kunci : Partai Politik, Pembatasan, Presidensiil.

ABSTRACT

The constitutional government system chosen by the Indonesian people is a presidential government system, a government which in practice is often encountered with practices that lead to a parliamentary government system. The Confusion System, which therefore influences the presidential election, will not be able to regulate an independent cabinet because it must prepare the interests of political parties to avoid conflicts with the House of Representatives (DPR). Such practice is certainly not healthy in implementing a presidential system because it will divert government approval to carry out its function as an executive institution.

The research method used in the preparation of this thesis is a normative research method, in which the data collection uses a statutory approach and a conceptual approach.

The urgency of limiting political parties in a presidential system is for government stability, because theoretically in a presidential government system the effectiveness of the number of political parties is one to two parties because this government system adheres to a simple party system.

The proposed solution is a middle ground between a combination presidential system and a simple multi-party system. Simple multi-party systems must be supported by close, disciplined and binding party alliances. To simplify Indonesian political parties, there are two mechanisms that can be carried out simultaneously, namely increasing the threshold and reducing the size of the electoral district.

Keywords: political party, restriction, presidential.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI | iii |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT | iv |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| ABSTRAK | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis..... | 8 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis | 8 |
| 1.5 Metode Penelitian | 8 |
| 1.5.1 Jenis Penelitian..... | 9 |
| 1.5.2 Metode Pendekatan..... | 9 |
| 1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum | 9 |
| 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 10 |
| 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 11 |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Konsep Hak Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Berpendapat, dan Demokrasi | 13 |

| | |
|---|------------|
| 2.2 Tinjauan Umum Mengenai Partai Politik dan Hak Berpolitik | 17 |
| 2.3 Makna Pemerintahan, Pemerintah, dan Sistem Pemerintahan | 25 |
| 2.4 Konsep Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia | 30 |
| 2.5 Mekanisme Pendirian Partai Politik di Indonesia | 38 |
| BAB III PEMBAHASAN | 47 |
| 3.1 Fungsi Partai Politik dalam Sistem Presidensiil | 47 |
| 3.1.1 Fungsi Partai Politik dalam Sistem Presidensiil di Indonesia | 47 |
| 3.1.2 Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensiil di Amerika Serikat..... | 49 |
| 3.2 Urgensi Pembatasan Partai Politik dalam Sistem Presidensiil | 59 |
| 3.2.1 Kedudukan Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil..... | 59 |
| 3.2.2 Pengaruh multi-partai dalam sistem pemerintahan presidensiil..... | 75 |
| BAB IV PENUTUP..... | 101 |
| 4.1 Simpulan | 101 |
| 4.2 Saran | 103 |
| DAFTAR BACAAN | 53 |